



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI TENTANG
PERSIAPAN ASRAMA HAJI PADA PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI TAHUN 2022M/1443M KE KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

MASA PERSIDANGAN III 2021-2022
4-6 FEBRUARI 2022



SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib;
3. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
4. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
5. Rapat internal.

C. Tujuan

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan tujuan Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khususnya Persiapan Asrama Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022M/1443H.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di laksanakan pada tanggal 4-6 Februari 2022.

E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Persiapan Asrama Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022M/1443H ini diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR-RI YANG MENGIKUTI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL 4-6 FEBRUARI 2022

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URU T	ANGG				
1.	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt	Ketua/Ketua Tim	PAN	BANTEN II
2.	166	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.	Wkl. Ketua	PDIP	JABAR III
3.	289	DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	Wkl. Ketua	PG	JABAR II
4.	003	H. MARWAN DASOPANG	Wkl. Ketua	PKB	SUMUT II
5.	211	UMAR BASHOR, S.E.	Anggota	PDIP	JATIM IV
6.	323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	P G	JATIM XI
7.	098	H. ABDUL WACHID	Anggota	GERINDR A	JATENG II
8.	371	Hj. SRI WULAN, S.E	Anggota	NASDEM	JATENG III
9.	14	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota	PKB	JABAR IX
10.	564	Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	DEMOKR AT	NTB II
11.	440	K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., M.A.	Anggota	PKS	JATENG I
12.	510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.	Anggota	PAN	BANTEN III
13.	468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	PPP	JATENG IV

F. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau

Tim Kunjungan Kerja akan melakukan Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kebandaraan, PT Angkasa Pura, keimigrasian, dan pihak terkait lainnya dengan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jawa Timur, dengan agenda sebagai berikut:

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M

Pandemi Covid 19 menjadi pelajaran bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M harus tetap mengedepankan prinsip kewaspadaan wabah penyakit agar jemaah haji dapat lebih siap menghadapi dan mencegah serta dapat beribadah secara khusyuk sesuai dengan ketentuan agama islam. Dampak covid 19 terhadap pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun Tahun 2020 dan tahun 2021 tentu saja berdampak bagi para jemaah haji, baik yang sudah bayar lunas dan seharusnya berangkat pada tahun ini maupun yang calon berangkat pada tahun-tahun berikutnya yang secara otomatis mundur jadwal pemberangkatannya.

Pemerintah Arab Saudi sampai dengan hari ini belum memberikan kepastian apakah seluruh negara dapat memberangkatkan jemaah haji. Tahun 2020 dan 2021 Jemaah haji hanya diperbolehkan bagi Warga negara Asing yang bermukim di Arab Saudi dan bagi warga negara Arab Saudi. Kabar baik adanya harapan bahwa akan adanya haji bagi calon jemaah haji di luar Arab Saudi adalah dicabutnya larangan masuk bagi negara-negara pengirim jemaah haji terbesar pada bulan november tahun 2021. Khusus Indonesia telah dapat mengirimkan jemaah umrahnya ke Arab Saudi sampai sekarang.

Pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memiliki rencana perjalanan serta perencanaan penyelenggaraan ibadah haji dengan memperhatikan perkembangan Pandemi Covid 19 protokol kesehatan agar pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji dapat optimal. Memperhatikan kebijakan terkini di dalam pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Protokol kesehatan dalam beribadah di Masjidil Haram untuk umrah dan Masjid Nabawi Madinah sekarang menggunakan pendaftaran melalui aplikasi sehingga Petugas dan jemaah haji bisa terbisa menggunakan aplikasi. Dalam pembinaan dengan sulitnya pertemuan tatap muka bagi jemaah haji dalam pembinaan manasik haji bagi jemaah haji maka perlu ada media online dengan menggunakan teknologi internet siap pakai yang tersedia atau dengan cara efektif lainnya seperti aplikasi android dan tutorial bimbingan manasik haji lainnya.

Kesiapan petugas haji baik itu pembimbing, tenaga kesehatan dan pendukung lainnya juga harus memiliki kesiapan yang ekstra kuat yang dibekali dengan pengetahuan, kemampuan dan peralatan yang menunjang kinerja petugas. Kesiapan sarana dan prasarana embarkasi haji, hampir seluruh embarkasi

asrama haji dijadikan tempat darurat perawatan atau isolasi mandiri bagi penanganan covid 19. Untuk itu seluruh embarkasi asrama haji harus di evaluasi agar tiba saatnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak mengurangi pelayanan bagi jemaah haji. Kesiapan Asrama Haji mengingat aturan protokol kesehatan membuat kapasitas kamar menjadi terbatas sehingga perlu pengaturan yang lebih efisien.

Provinsi Jawa Timur memiliki kuota jemaah haji yang sangat besar sehingga memiliki jumlah kloter yang besar. Kapasitas asrama haji surabaya dengan konsekuensi protokol kesehatan akan menimbulkan antrian bagi jemaah haji masuk ke asrama haji dan menimbulkan biaya yang sangat besar. Untuk itu perlunya masukan pendalaman dari Kanwil Kementerian Agama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022.

Fungsi Asrama Haji

Kewajiban untuk masuk dalam asrama haji, dimulai pada tahun 1970. Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia (WHO). Ada ketentuan WHO yang mengharuskan warganegara Indonesia yang ingin ke luar negeri dikarantina dulu sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan agar jemaah haji Indonesia di karantina selama lima hari setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba di tanah air.

Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari setelah tiba di tanah air. Penyewaan tersebut sangat besar, selain itu wisma yang disewa memang tidak dipersiapkan untuk jemaah haji. Tidak heran, kalau tidak dilengkapi sarana yang dibutuhkan untuk jemaah haji.

Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu, baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira negara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani Tjokrohandoko, yang memerintahkan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, yang pada waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jemaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami kenaikan sampai tiga kali lipat. Maka, asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta dan Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan.

Sekarang, jamaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi. Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama yang berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal sampai keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji.

Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di bawah lingkungan Kementerian Agama di bawah tanggung jawab Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Dalam Pelaksanaan Haji, Asrama Haji mempunyai peran yang sangat penting yaitu:

- a. Penyusunan dan perencanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi jamaah haji dan masyarakat lainnya.
- c. Pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset, dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Profil UPT Asrama Haji Surabaya Jawa Timur

Asrama Haji Sukolilo Surabaya memiliki luas area kurang lebih 67.675 M², usia bangunan Asrama Haji rata-rata telah mencapai 22 – 38 tahun lebih sehingga sangat beresiko bagi keamanan, kenyamanan dan pelayanan para pengguna Asrama Haji khususnya Jamaah Haji. Program revitalisasi Asrama Haji sudah dilakukan melalui program pembiayaan SBSN pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang diharapkan akan memiliki banyak fasilitas seperti Penginapan Kamar dan Aula yang setara dengan hotel bintang 3. Asrama Haji Sukolilo Surabaya memberangkatkan Jamaah haji dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Upaya peningkatan melalui program revitalisasi Asrama Haji harus berkesinambungan melalui perencanaan yang baik dan dilakukan setiap tahun sehingga seluruh Asrama Haji mampu menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan Jamaah haji setara hotel bintang 3. Selanjutnya di luar musim haji dapat dilakukan kegiatan lain yang mampu memberikan penerimaan pendapatan bagi Asrama haji. Konsep bisnis untuk kegiatan lain di luar musim haji harus dilakukan secara professional dengan strategi pemasaran, lingkup bisnis dan memperhatikan penerimaan pendapatan bagi Asrama Haji Surabaya.

Lokasi Asrama Haji yang strategis harus dimanfaatkan untuk ditingkatkan penunjang penginapan dan ruang pertemuan yang mampu sesuai kebutuhan masyarakat Surabaya seperti kegiatan pernikahan, pertemuan besar perkantoran, wisuda perguruan tinggi, Pelatihan-pelatihan, seminar, Pendidikan dan lain-lain.

Untuk menunjang pengelolaan yang professional maka dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten di bidangnya dalam pengelolaan hotel bintang 3. Sehingga manajerial Asrama Haji Surabaya mampu mengikuti arus perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan Asrama Haji dalam rangkaian kegiatannya.

Pertumbuhan akan kebutuhan penginapan yang mampu menampung dalam skala besar merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang, dengan memanfaatkan waktu di luar masa operasional Haji. Berbagai kegiatan dalam skala regional atau daerah maupun nasional dapat memanfaatkan Fasilitas Asrama Haji, tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh manajerial Asrama Haji. Saat ini Asrama Haji Embarkasi Surabaya telah 38 tahun berdiri dan kondisi bangunan sarana maupun prasarana sangat membutuhkan rehabilitasi dan peremajaan untuk menjamin kenyamanan maupun keamanan para pengguna khususnya para Jamaah Calon Haji, kondisi pembangunan Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang diharapkan dapat terwujud menjadi Asrama Haji yang modern dan lengkap yang mampu melayani calon Jemaah haji dan umrah serta kegiatan masyarakat lainnya.

Hasil Pertemuan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M

Pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M dilakukan di Aula Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur sesuai dengan agenda. Dihadiri oleh segenap tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, bapak Husnul Maram, dan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya, bapak Sugianto. Hadir pula Dirjen PHU Kementerian Agama RI, bapak Prof. Hilman Latief, PhD, dari pihak kebandaraan, keimigrasian, KKP, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Timur yang lain.



Pada paparannya, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi VIII DPR, bahwa dengan perkembangan dinamika masyarakat dan proses modernisasi yang begitu cepat, tuntutan dan harapan terhadap layanan fasilitas Asrama haji terus meningkat sebagaimana layaknya standar layanan hotel bintang 3 (tiga) yang memenuhi aspek standard kenyamanan, keamanan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Selain itu fungsi asrama juga berkembang menjadi multi fungsi tidak hanya untuk kegiatan Ibadah Haji melainkan kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi secara islami dan syariah.

Peluang untuk mewujudkan tuntutan dan harapan tersebut sangat besar dengan meningkatkan kualitas kapasitas dan layanan, serta lokasi Asrama Haji yang sangat strategis secara ekonomi. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa Bangunan Asrama haji Embarkasi Surabaya rata-rata sudah berumur 35 s.s 43 tahun dengan kondisi yang kurang nyaman dan belum memenuhi standar hotel bintang 3 (tiga) sehingga perlu direhabilitasi dan pengembangan dengan menambahkan sarana prasarana.

Gedung Asrama haji selama tiga tahun belakangan ini masih terawat dengan baik dan digunakan untuk Isolasi Covid -19 dan Karantina PMI, untuk kamar gedung yang lama sebagian besar masih menggunakan ranjang kayu susun dengan kapasitas 8 orang dan 10 orang.

UPT Asrama haji Embarkasi Surabaya mendapat anggaran dari SBSN untuk dibangun gedung Peginapan setara Hotel bintang 3 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung Zam Zam SBSN tahun 2017 5 lantai kapasitas 111 kamar, 333 tempat tidur berfungsi dan digunakan untuk isolasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surabaya

- b. Bangunan Gedung Shofa SBSN tahun 2018 3 lantai kapasitas 52 kamar, 156 tempat tidur berfungsi dan digunakan untuk isolasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surabaya
- c. Bangunan Gedung Hall Muzdalifah SBSN tahun 2019 1 lantai kapasitas 1000, berfungsi dan digunakan penerimaan jamaah haji dan ruang pertemuan

Kepala UPT juga menyampaikan bahwa rencana persiapan Haji tahun 2022M/1443H sudah disiapkan meskipun gedung digunakan untuk karantina PMI/PPLN dan Isolasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan perjanjian bahwa jika ada pelaksanaan ibadah haji seluruh kegiatan baik itu karantina PMI/PPLN dan Isolasi Covid-19 sebulan sebelum pelaksanaan pemberangkatan haji sudah harus dikosongkan untuk sterilisasi pelaksanaan ibadah haji.

Gedung lama ada 14 gedung dibangun antara tahun 1978 s.d 1981 yang terdiri dari:

a. Jumlah kamar dan Hall

- 1) Gedung A1 12 kamar 4 bed
- 2) Gedung A2 24 kamar 4 bed
- 3) Gedung B1 24 kamar 4 bed
- 4) Gedung B2 22 kamar 4 bed
- 5) Gedung C1 22 kamar 4 bed
- 6) Gedung C2 24 kamar 4 bed
- 7) Gedung D1 24 kamar 8 bed susun
- 8) Gedung D2 24 kamar 8 bed susun
- 9) Gedung E1 26 kamar 8 bed susun
- 10) Gedung E2 28 kamar 8 bed susun
- 11) Gedung F1 33 kamar 10 bed susun
- 12) Gedung F2 33 kamar 10 bed susun
- 13) Gedung G1 24 kamar 8 bed susun
- 14) Gedung G1 22 kamar 8 bed susun
- 15) Gedung Zam Zam 111 kamar 333 bed
- 16) Gedung Shofa 52 kamar 156 bed
- 17) Hall Penerimaan jamaah Haji ada 2 hall Mina dan Muzdalifah
- 18) Hall Pemberangkatan jamaah Haji Hal Bir Ali atas
- 19) Ruang makan jamaah ada 8 hall hal A, B, C, D, E, F, G dan hall Khusus
- 20) Hall untuk pembinaan Karu karom ada 2 hall Zam Zam dan Hall Shofa

b. Daya Tampung:

- 1) Bed Susun: 2.040 orang
- 2) Bed Non Susun: 1.137 orang

Total daya tampung : 3.177 orang / jamaah

c. Jamaah tahun 2019

- 1) Jawa Timur : 35.323 jamaah
- 2) Bali : 632 jamaah
- 3) NTT : 721 jamaah
- 4) Petugas kloter : 380 jamaah

Total Keberangkatan : 37.056 jamaah

Mengenai kendala, Kepala UPT menyampaikan bahwa tidak ada kendala dan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku karena UPT Asrama haji bisa untuk 3 kloter jamaah Haji sesuai dengan kapasitas yang tertera diatas

Berkaitan dengan kecukupan fasilitas, Kepala UPT menyampaikan anggaran masih sangat kurang dikarenakan kebutuhan untuk pemeliharaan gedung diperlukan anggaran yang sangat besar.



Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam paparan dan sambutannya menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji masih menunggu Kebijakan Menteri Agama terkait dengan Penetapan Kuota Haji
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, terus menerus melakukan pendataan Jamaah Haji yang lunas di tahun 2020
3. Jumlah jamaah haji yang berhak lunas tahun 2020 sebanyak 33.425 orang
4. Jika Tahun 2022 ini ada keberangkatan haji, maka jamaah haji kloter pertama akan masuk di Asrama Haji pada tanggal 3 Juni 2022 dan akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 4 Juni 2022
5. Terkait persiapan dokumen jamaah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah memberitahukan dan memerintahkan kepada daerah agar:
 - 1) Memberitahukan kepada jamaah yang paspornya sudah expired/hilang/rusak untuk segera membuat paspor baru.
 - 2) Masa expired paspor jamaah haji tahun 2022 yaitu 3 Januari 2023
 - 3) Melakukan input paspor ke dalam sistem siskohat, bagi jamaah pengganti (pelimpahan porsi)
 - 4) Paspor, setoran lunas, foto jamaah yang belum dipindai, agar segera dipindai
6. Terkait data jamaah pada Penyelenggaraan Haji Tahun 1443H/2022M sebagai berikut:
 - Jumlah CJH yang sudah melunasi pada tahun 2020 sejumlah 30.319 orang
 - Jumlah CJH yang mengambil setoran lunasnya sejumlah 487 orang
 - Jumlah Paspor yang sudah ter scan MRTD sejumlah 29.038 orang (95%)

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan mengenai Perkembangan pembangunan Pelayanan Haji Umrah Terpadu melalui pembiayaan SBSN. Dalam rangka memenuhi kebutuhan standar sarana prasaranana layanan Haji dan Umroh melalui Program Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layan Haji dan Umroh Terpadu yang dibiayai dari SBSN. Adapun daerah yang sudah mendapatkan Program pembangunan dimaksud sebagai berikut:

1. Tahun 2019 merupakan awal pembiayaan SBSN PLHUT di Jawa Timur, yang mendapatkan anggaran ada 4 Daerah:
 - a. Kabupaten Jember

- b. Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kabupaten Tuban dan
 - d. Kabupaten Malang
2. Tahun 2020 yang disetujui mendapatkan Anggaran SBSN PLHUT ada 2 Daerah yaitu:
 - a. Kabupaten Lumajang
 - b. Kabupaten Pamekasan
 3. Tahun 2021 yang disetujui mendapatkan Anggaran SBSN PLHUT ada 2 daerah yaitu:
 - a. Kabupaten Blitar
 - b. Kabupaten Tulungagung.
 4. Untuk Tahun 2022 yang sedang berjalan yang disetujui mendapatkan Anggaran SBSN PLHUT sebanyak 6 daerah kabupaten Kota yaitu:
 - a. Kota Malang: 3.210.923.000.00
 - b. Kota Batu: 2.831.301.000.00
 - c. Kabupaten Madiun: 2.869.060.000.00
 - d. Kabupaten Sumenep: 2.826.582.000.00
 - e. Kabupaten Probolinggo: 2.517.120.000.00
 - f. Kabupaten Situbondo: 2.802.942.000.00

JUMLAH :17.057.928.000.00
 5. Progres Pelaksanaan Pembangunan PLHUT tahun 2022 Saat ini sedang Proses Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Perencana sebagai berikut :

No	Kab. Kota	tgl Kontrak		Pagu	Nilai Kontrak
		Awal	Akhir		
1	Kab. Madiun	31 Januari 2022	1 Maret 2022	80.000.000	79.552.000
2	Kota Batu	19 Januari 2022	17 Pebruari 2022	69.520.000	69.520.000
3	Kab. Sumenep	3 Januari 2022	1 Pebruari 2022	69.421.000	69.370.400
4	Kab. Probolinggo	5 Januari 2022	3 Pebruari 2022	59.360.000	58.124.000
5	Kab. Situbondo	17 Januari 2022	16 Pebruari 2022	68.915.220	67.265.000
6	Kota Malang	25 Januari 2022	16 Pebruari 2022	77.162.000	77.077.000

Selanjutnya yang sudah selesai proses Perencanaan /Gambar akan segera mengajukan Panitia Lelang ke UKPBJ, di samping memproses administrasi penyerapan Anggaran.

6. Daftar tunggu jemaah haji dan kondisi jemaah haji yang sudah lunas bayar tahun 2020:

- a. Daftar tunggu jamaah haji Provinsi Jawa Timur selama 32 tahun (daftar hari ini berangkat tahun 2053)
 - b. Jumlah pendaftar per tanggal 3 Februari 2022 sebanyak : 1.087.817 orang
 - c. Kondisi jamaah yang sudah melunasi, banyak yang bertanya, baik itu melalui surat maupun melalui telepon, ke daerah dan kanwil terkait keberangkatan mereka,
 - d. Rata-rata mereka mengeluhkan usia yang sudah tua dan kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Karen ditunda-tunda terus mereka mengkhawatirkan usia dan kesehatannya.
7. Rencana dan usulan peningkatan pelayanan jamaah haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022M/1443H:
- a. Biaya untuk komponen Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji di Embarkasi/ Debarkasi
 - b. Biaya untuk komponen Pelindungan Jamaah
 - c. Biaya untuk komponen Pelayanan di Embarkasi atau Debarkasi
 - d. Biaya untuk komponen Dokumen Perjalanan Jamaah
 - e. Biaya untuk komponen Pelayanan Umum di Dalam Negeri meliputi insentif Karu Karom, Maintenance Pernagkat Siskohat, Pengadaan APD dan Belanja Modal
 - f. Biaya untuk komponen Pengelolaan BPIH
8. Kebutuhan anggaran terhadap peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
- a. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji tersebut sebesar Rp. .63.343.839.000,- (Enam puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah). Namun hingga saat ini belum ada penetapan anggaran BPIH tahun 1443H/2022M;
 - b. Untuk anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 belum teralokasi untuk operasional petugas kloter yang menyertai jamaah haji sebesar Rp. 10.664.000.000 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - c. Program unggulan untuk kegiatan Sosialisasi Informasi Haji dan Umrah kepada masyarakat dengan media Mobil Informasi Keliling belum teranggarkan.
9. Dukungan kebijakan Kementerian Agama terhadap bimbingan manasik haji bagi jamaah haji yang sudah mendaftar:
- a. Belum ada Kebijakan terkait dengan bimbingan manasik bagi jamaah haji yang sudah mendaftar (waiting list)

- b. Harapan kami, ada alokasi anggaran untuk melakukan bimbingan manasik haji bagi jamaah yang masih daftar tunggu
 - c. Saat ini yang berjalan, bimbingan manasik diserahkan kepada masing-masing jamaah dengan mendaftar bimbingan di KBIHU
 - d. Kanwil Kementerian Agama hanya dapat melakukan permintaan kepada steak holder, yaitu menghimbau kepada para pembimbing ibadah bersertifikat, mantan Petugas Haji dan aparat di daerah (KUA, Penyuluh, dls) yang memiliki kompetensi dibidang bimbingan agar dapat melakukan bimbingan manasik sepanjang tahun dengan memanfaatkan forum-forum tidak resmi, seperti, khutbah jumat, pengajian, majelis taklim, dls
 - e. Kegiatan tersebut, dilakukan atas dasar sukarela tanpa di dukung kebijakan tertulis dan juga anggaran
10. Hambatan dan kendala terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022:
- a. Kendala dan hambatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di daerah, rata-rata kurangnya fasilitas kendaraan bagi seksi PHU Kab/Kota untuk melakukan pantauan/monitoring di kecamatan-kecamatan dan juga konsultasi di Kanwil Kemenag
 - b. Hambatan yang lain, yaitu, masih adanya Kabupaten/Kota yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah haji dari daerah ke Embarkasi/Debarkasi dan sebaliknya.

BAB III

REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan mengenai Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut hasil kunjungan kerja:

1. Komisi VIII DPR RI perlu menindaklanjuti aspirasi dan masukan dari calon Jemaah Haji Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, bahwa para calon jemaah haji Jawa Timur sangat berharap adanya pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2022. Diupayakan tidak ada kenaikan biaya yang harus ditanggung calon jemaah haji, namun apabila pemerintah memutuskan terdapat peningkatan biaya haji, calon jemaah siap membayar yang penting dapat berangkat ke tanah suci.
2. Komisi VIII DPR RI perlu menindaklanjuti masukan dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Jawa Timur mengenai usulan peningkatan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan terhadap calon jemaah haji.
3. Komisi VIII DPR RI dalam membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu mendapatkan masukan yang lebih banyak dari para calon jemaah haji, sehingga diperlukan kunjungan kerja ke daerah lain.

TIM KUNKER SPESIFIK

KOMISI VIII DPR-RI

Foto Kegiatan



